SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2025 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025 – 2030;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETA JALAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2025-2030.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
2. Revitalisasi SMK adalah upaya sistematis, terencana, terukur, dan terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan kejuruan berkualitas di SMK guna peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui optimalisasi semua unsur pendidikan yang terkait.
3. Peta Jalan Revitalisasi SMK adalah rencana strategis yang disusun sebagai pedoman dalam upaya revitalisasi SMK dengan melibatkan pemangku kepentingan.
4. Dunia usaha/dunia industri/dunia kerja yang selanjutnya disebut Dudika adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
6. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pendidikan Khas Kejogjaan adalah pendidikan pengembangan karakter berbasis budaya yang dilaksanakan berdasar dan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya kejogjaan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI, DAN MUATAN

Pasal 2

(1) Peta jalan Revitalisasi SMK bertujuan untuk:
   a. menyelaraskan pendidikan kejuruan dengan arah pembangunan Daerah;
   b. mengurangi tingkat pengangguran lulusan SMK;
   c. meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

d. meningkatkan peran SMK dalam ekosistem inovasi Daerah; dan

e. menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi program revitalisasi SMK di Daerah.

(2) Peta Jalan Revitalisasi SMK berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dan SMK dalam perencanaan Revitalisasi SMK.

(3) Peta Jalan Revitalisasi SMK disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Peta jalan revitalisasi SMK memuat:

a. program/kegiatan;

b. strategi;

c. target capaian;

d. tahun pelaksanaan;

e. pihak yang terkait, dan

f. penanggung jawab.

(5) Rincian muatan Peta Jalan Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KEBIJAKAN DAN SASARAN

Pasal 3

(1) Kebijakan Peta Jalan Revitalisasi SMK difokuskan pada:

a. pengembangan dan penyelarasan Kurikulum;

b. pemenuhan standardisasi sarana dan prasarana;

c. pemenuhan dan peningkatan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

d. inovasi pembelajaran;

e. kemitraan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

f. pengelolaan dan penataan kelembagaan;
g. Pendidikan Khas Kejogjaan di era transformasi digital;
h. sistem informasi hulu-hilir pendidikan kejuruan; dan
i. monitoring dan evaluasi.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
a. terlaksananya penyelarasan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan Dudika dan kebutuhan peserta didik;
b. tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi sesuai standar Dudika yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait;
c. adanya Pendidik dan Tenaga Kependidikan kejuruan yang profesional dan kompeten;
d. terlaksananya inovasi pembelajaran secara aktif berdasarkan kebutuhan Dudika, kompetensi di era digital, pembentukan karakter melalui Pendidikan Khas Kejogjaan dan perkembangan lainnya sesuai kebutuhan;
e. terciptanya upaya optimalisasi peran kemitraan yang integratif untuk mendukung peningkatan keterserapan lulusan SMK;
f. terlaksananya upaya pengelolaan dan penataan lembaga secara mandiri dan berdaya saing;
g. terlaksananya program pembudayaan karakter Pendidikan Khas Kejogjaan;
h. tersedianya sistem informasi yang komprehensif dan integratif dengan pihak terkait dari hulu ke hilir untuk memastikan kematangan karir lulusan SMK dan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja; dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

i. adanya proses monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program revitalisasi SMK kepada pengguna dan para pihak yang terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Peta Jalan Revitalisasi SMK dilaksanakan secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi.

(2) Peta Jalan Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan;
   c. pemantauan;
   d. evaluasi; dan
   e. pelaporan.

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Gubernur membentuk tim koordinasi.

(2) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(3) Susunan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
   a. Perangkat Daerah terkait;
   b. SMK;
   c. Dudika;
   d. perguruan tinggi/akademisi; dan
   e. pihak lain yang terkait.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(4) Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK di seluruh SMK di Daerah; dan
   b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK.

(5) Susunan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK dilaksanakan dengan tujuan:

a. memastikan efektivitas pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK;
b. mengetahui capaian keberhasilan pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK; dan
c. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK.

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK secara berjenjang dan periodik.

(2) Pemantauan pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau dalam hal diperlukan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(3) Evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam hal diperlukan.

(4) Tim koordinasi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan Peta Jalan Revitalisasi SMK.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ARIA NUGRAHADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

Hary Setiawan, S.H., M.H.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2025 – 2030

RINCIAN MUATAN PETA JALAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2025-2030

A. KEBIJAKAN: PENGEMBANGAN DAN PENYELARASAN KURIKULUM.										
SASARAN: 100% SMK melakukan penyelarasan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA dan kebutuhan peserta didik.										
STRATEGI I	Reviu SKKNI-IQF, analisis skill, penyusunan peta okupasi dan kualifikasi kompetensi, pembaharuan dokumen kurikulum berbasis DUDIKA, pengembangan inovasi pembelajaran.									
No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1	Penyusunan kurikulum berbasis DUDIKA dan kebutuhan peserta didik.	SMK memiliki dokumen kurikulum adaptif berbasis DUDIKA dan kebutuhan peserta didik.	33 %	49 %	65 %	81 %	97 %	100 %	Disdikpora DIY (BLPT); Disnakertrans DIY; LSP Provinsi	KADIN DIY, Disnakertrans, Perguruan Tinggi (PT), LSP
2	Reviu SKKNI yang ada saat ini agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kompetensi di DUDIKA dan pengembangan standar kompetensi kerja berbasis kebutuhan DUDIKA, termasuk *future job, green job* dan *digital creative.*	SMK menggunakan kurikulum berbasis DUDIKA; Reviu dilakukan 1 kali setiap tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora DIY (BLPT); Disnakertrans DIY; LSP Provinsi	sda
3	Membentuk Skema KKNI: a. Menyusun dan *update* MUK (Materi Uji Kompetensi) Skema KKNI Level II secara berkala	SMK melakukan pembaharuan dokumen kualifikasi kompetensi	30%	40%	55%	75%	90%	90%	Disdikpora DIY (BLPT); Disnakertrans DIY; LSP Provinsi	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	disemua kompetensi SMK DIY; b. Menyusun skema KKNI level II Kompetensi Keahlian Khusus DIY; Menyusun MUK skema klaster dengan perusahaan.	setiap peta okupasi.								
4	Penyusunan peta okupasi dan kualifikasi kompetensi berdasarkan KKNI pada seluruh sektor.	SMK memiliki peta okupasi dan kualifikasi kompetensi.	50%	58,75%	67,5%	76,25%	85%	85%	Disdikpora DIY (BLPT); Disnakertrans DIY; LSP Provinsi	sda
5	Pengembangan berbagai inovasi strategi, pendekatan, model, metode pembelajaran yang selaras dengan DUDIKA.	SMK memiliki modul ajar menerapkan model pembelajaran PJBL, PBL, *Teaching Factory*.	35%	50%	65%	80%	95%	100%	Disdikpora DIY (BLPT); Disnakertrans DIY;Kadin, LSP Provinsi	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6	Membangun jejaring kerjasama antar *stake holders* untuk menyelaraskan kurikulum SMK dan Industri.	SMK perjanjian kerjasama dengan DUDIKA.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora DIY (BLPT); Disnakertrans DIY; LSP Provinsi	sda
STRATEGI II	Meningkatkan program SMK berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan informasi pasar kerja yang berkelanjutan.									
No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Pengembangan SMK sebagai tempat *skilling, reskiling* dan *upskilling* sebagai analisis kebutuhan pelatihan.	SMK tempat program *reskilling* dan *upskilling* untuk lulusan.	20%	25%	30%	35%	40%	45%	Disdikpora DIY (BLPT)	KADIN DIY, Balai Besar Vokasi, Disnakertrans, PT, LSP
2	Pengembangan proses pemagangan lanjutan bagi lulusan SMK yang masih belum bekerja.	SMK menjadi tempat pemagangan lanjutan bagi lulusan yang belum bekerja.	10%	25%	30%	35%	40%	45%	Disdikpora DIY (BLPT)	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3	SMK melakukan kajian *re-engineering* dan pembukaan kompetensi keahlian baru untuk memenuhi kebutuhan industri sesuai prinsip *demand driven.*	SMK memiliki kajian pembukaan program keahlian baru dan diajukan untuk mendapatkan rekomendasiRekomendasi pembukaan program keahlian baru setiap tahun.	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	Disdikpora DIY (BLPT)	sda

STRATEGI III	Pengembangan kurikulum SMK yang mampu memenuhi persyaratan industri, mengembangkan Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ), dan beradaptasi dengan tuntutan kekinian teknologi, serta mampu memenuhi permintaan pasar kerja baik lokal, nasional maupun internasional serta menjadi pilihan pertama lulusan SMP.

No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Pengkajian dan penelitian terhadap program keahlian yang sangat diperlukan	Diperoleh rekomendasi program	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	PT, Disnakertrans, KADIN DIY, LSP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	(termasuk fenomena animo rendah dan animo tinggi pada program keahlian tertentu di SMK tertentu terkait), terkait pengembangan kewilayahan DIY 2025-2030 (pengembangan kawasan industri, kawasan Afirmasi 3T, kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, kawasan dengan *multi-infrastructure*).	keahlian yang prospektif untuk bertumbuhnya variasi kawasan dan artikel publikasi.								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2	Perekayasaan kebijakan terhadap bidang keahlian yang memiliki animo rendah tetapi sangat diperlukan untuk pengembangan potensi daerah: a. Memberikan beasiswa khusus program keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan potensi daerah; b. Mengalokasikan pendanaan khusus program keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan potensi daerah; c. Melakukan sosialisasi agar animo masyarakat meningkat.	Animo masuk SMK meningkat.	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Disdikpora	PT, Disnakertrans, KADIN DIY, LSP
3	Promosi/ sosialisasi SMK sebagai sekolah favorit (*first choice*) di SMP: a. Membuat media promo untuk DIY, nasional, dan	Animo masuk SMK meningkat.	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Disdikpora	PT, Disnakertrans, KADIN DIY, LSP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	internasional (media elektronik, cetak, dll); b. SMK Expo, *Job Fair*, lomba inovasi, memperlihatkan cerita sukses dari lulusan SMK, serta mempertemukan antara SMK dan DUDIKA.									

B. KEBIJAKAN: PEMENUHAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA

SASARAN: 25% SMK memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai standar DUDIKA, dilengkapi sarana prasarana berbasis TIK dan dimanfaatkan sebagai *resource sharing.*

STRATEGI I	Identifikasi kebutuhan, pengadaan, pembaharuan, sertifikasi sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan vokasional di SMK.

No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Identifikasi dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di SMK	SMK memiliki dokumen rencana pengembangan sarana-prasarana	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Disdikpora	PT, Disnakertrans, KADIN DIY, LSP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		standar DUDIKA berbasis TIK; pembaharuan setiap tahun.								
2	Pengadaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan yang efektif sesuai perkembangan teknologi dan memadai untuk pembelajaran.	SMK memiliki sarana-prasarana standar DUDIKA berbasis TIK.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Disdikpora	Sda
3	Pemenuhan sarana-prasarana untuk mengakomodasi penyandang disabilitas.	5 sekolah setiap tahun.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	Sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4	Tersedianya workshop dan laboratorium untuk pemanfaatan *teaching factory* yang terintegrasi sesuai dengan standar industri dan perkembangan teknologi.	SMK memiliki sarana workshop, laboratorium dan *teaching factory.*	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Disdikpora	Sda
5	Penyelenggaraan akreditasi untuk segala fasilitas disekolah yang terkait (misalnya perpustakaan).	SMK melakukan akreditasi sarana-prasarana standar DUDIKA berbasis TIK.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Disdikpora	Sda
6	Penerapan *resource sharing* untuk mempermudah pelaksanaan berbagi kesempatan praktek menggunakan peralatan memadahi yang dimiliki oleh *stake holders.*	Pedoman *resource sharing* antar sekolah, antara sekolah dengan DUDIKA, penggunaan peralatan praktik yang memadahi di SMK.	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Disdikpora	Sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

STRATEGI II	Optimalisasi sarana pembelajaran berbasis TIK (*e-learning*) di SMK.									
No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Pemanfaatan sarana teknologi informasi sebagai peralatan pembelajaran berbasis TIK (*e-learning*) di SMK.	TIK (*e-learning*) telah digunakan di SMK.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	PT, Disnakertrans, KADIN DIY, LSP
2	Penguatan jaringan internet di setiap sekolah	Jaringan internet stabil di SMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora (BTKP, Diskominfo)	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3	Optimalisasi *web server* dan *database server, platform e-learning.*	Peningkatan kinerja di semua *e-learning* setelah optimalisasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora (BTKP, Diskominfo)	sda
4	Pengembangan konten *e-learning* yang menarik.	Evaluasi *e-learning* dari aspek *usability* menunjukkan hasil sangat baik di semua SMK yang diteliti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora (BTKP)	sda

C. KEBIJAKAN: PEMENUHAN DAN PENINGKATAN PROFESIONALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

SASARAN: 100% SMK memiliki pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan yang profesional dan kompeten.

STRATEGI I	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang dan kebutuhan dari masing-masing program keahlian di SMK.

No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1	Pemetaan ketersediaan dan penyusunan kebutuhan guru kejuruan berdasarkan bidang keahlian.	Tersedianya dokumen peta kebutuhan guru.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	PT, Disnakertrans, KADIN DIY, LSK
2	Penataan PTK.	PTK memiliki kualifikasi pekerjaan sesuai dengan bidang akademik dan sertifikat kompetensiny a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
3	Pelatihan, *upskilling, reskilling* dan sertifikasi kompetensi untuk guru kejuruan.	Sertifikasi pelatihan bagi guru SMK.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4	a. Penyelenggaraan diklat pengembangan kompetensi abad 21 untuk PTK; b. Fasilitasi pengembangan multi bahasa bagi semua PTK oleh SMK; c. Pengembangan kompetensi semua PTK dalam pemanfaatan TIK. d. Penguatan gerakan guru pembelajar di semua SMK; e. Penguatan Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ).	Meningkatnya kapasitas semua PTK dalam aspek kompetensi abad 21, dan PKJ.	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Disdikpora	sda
5	Magang guru mata pelajaran produktif di industri terkait.	Seluruh guru SMK pernah melakukan pemagangan di Industri/ PT minimal satu kali dalam 5 tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6	Peningkatan pendidikan formal bagi guru pendidikan menengah kejuruan.	Pendidikan formal guru SMK minimal S2 linier.	40%	40%	50%	60%	70%	80%	Disdikpora	Sda
7	Pelaksanaan *In House Training* teknologi terbaru di setiap SMK atau gabungan beberapa SMK.	Pelaksanaan IHT bagi semua guru SMK minimal 1 kali setiap tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
STRATEGI II	Peningkatan kualitas karya hasil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru SMK.									
No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1	Kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait untuk mewadahi publikasi karya penelitian/ *best practice* guru SMK.	Penerbitan media publikasi oleh kerjasama PT dan instansi terkait yang mampu menampung bidang keahlian guru SMK.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora (BTKP)	PT, Disnakertrans, KADIN DIY, LSP
2	Sinergitas antara SMK dengan PT dalam upaya peningkatan kualitas PKB guru SMK.	Dokumen IA antara SMK dan PT; pendampingan PKB 2 kali setiap tahun.	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3	Sinergitas antara SMK dengan PT dalam Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK untuk mempertahankan keunggulan kapasitas Guru SMK di DIY.	Dokumen IA antara SMK dan PT; pendampingan dan pelaksanaan UKG satu kali setiap tahun.	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Disdikpora	sda

D. KEBIJAKAN: INOVASI PEMBELAJARAN.	
SASARAN: 100% SMK secara aktif melakukan inovasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan DUDIKA, kompetensi di era digital, Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) dan perkembangan lainnya sesuai kebutuhan.	
STRATEGI I	Penyelenggaraan program pendidikan *link and match* antara pendidikan menengah kejuruan dan industri mitra sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan atau berwirausaha di era transformasi digital.

No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1	Pengembangan SMK berkeunggulan komparatif dan kompetitif yang menghasilkan lulusan berkarakter kerja unggul.	Meningkatnya kepuasan dari pengguna lulusan SMK yang telah mengimplementasikan PKJ.	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	Disdikpora, Dinas Kebudayaan, Dewan Pendidikan	KADIN DIY, Disnakertrans, PT, LSP
2	Pengembangan SMK berbasis industri.	a. SMK BLUD b. Meningkatnya jumlah SMK sebagai replikasi industri.	45 %	75%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
3	Pengembangan SMK sebagai pusat inkubasi kewirausahaan.	Meningkatnya jumlah SMK sebagai pusat inkubasi kewirausahaan.	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4	Peningkatan kapasitas lulusan SMK dalam berwirausaha berbasis digital.	Meningkatnya kapasitas lulusan SMK dalam berwirausaha berbasis digital setiap tahun.	5%	10%	15%	20%	20%	20%	Disdikpora	sda
STRATEGI II	Penyelenggaraan pembelajaran yang mengintegrasikan pengembangan adaptabilitas karir siswa SMK.									
No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Pengembangan Pusat Pengembangan Karir Siswa (PPKS).	SMK memiliki PPKS sesuai standar.	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	KADIN DIY, Disnakertrans, PT
2	Pengintegrasian konsep adaptabilitas karir di SMK ke dalam modul ajar beserta indikator penilaiannya	Indikator penilaian dan modul ajar integrasi adaptabilitas karir di SMK.	50 %	75 %	85 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	PT, Disnakertrans

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3	Sosialisasi adaptabilitas karir siswa SMK bagi guru.	Guru SMK mengikuti sosialisasi adaptabilitas karir siswa SMK.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	KADIN DIY, Disnakertrans
4	Sosialisasi adaptabilitas karir siswa SMK bagi orangtua setiap tahun pada saat PPDB.	Wali siswa mengikuti sosialisasi adaptabilitas karir siswa SMK.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	sda
5	Sosialisasi adaptabilitas karir siswa SMK bagi siswa secara berulang minimal satu kali setiap tahun.	Siswa mengikuti sosialisasi adaptabilitas karir siswa SMK.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	Sda
6	Pemetaan minat bakat karir siswa dari awal masuk SMK.	Semua sekolah melakukan pemetaan minat bakat karir siswa dari awal masuk SMK.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	Sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

7	Guru aktif menjadi mentor karir siswa SMK.	Semua Guru aktif mendampingi dan membimbing siswa dalam menemukan minat bakat dan karirnya.	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	Disdikpora	KADIN DIY, Disnakertrans, PT

STRATEGI III	Penyelenggaraan pembelajaran yang selalu memperbaharui strategi pengajarannya sesuai dengan kebutuhan di kelas dan kesesuaiannya dengan industri.

No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Analisis permasalahan dan kebutuhan di kelas dan DUDIKA	SMK membuat laporan hasil analisis kebutuhan kelas.	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	Disdikpora	PT
2	Pengembangan strategi pengajaran/ pembelajaran terbaru sesuai dengan kebutuhan di kelas.	Guru melakukan rekonstruksi modul ajar minimal 2 kali setiap tahun.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	PT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3	Pembiasaan budaya bugar.	SMK membuat program pembiasaan budaya bugar.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora, Dinkes	PT, Disnakertrans, KADIN DIY
4	Pengembangan inovasi metodologi pembelajaran (PBL, sistem blok, TIK) dan *mainstreaming* prinsip akuntabilitas untuk efisiensi anggaran.	Meningkatnya laporan *best practice* 10 guru SMK setiap tahun.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora (Baldik)	sda
5	Penguatan *teaching factory:*								Disdikpora	
	a. Menerbitkan pedoman pengelolaan *teaching factory* sebagai model pembelajaran;	Terlaksananya FGD dua kali dalam setahun, dan tersusunnya dokumen *teaching factory.*	50 %	100 %	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	b. Penyelenggaraan konsep pembelajaran *teaching factory* dengan otonomi pengelolaan keuangan yang fleksibel;	Meningkatnya jumlah keberhasilan *teaching factory* setiap tahun.	45%	50%	70%	80%	90%	100%	Disdikpora	sda
	c. Peningkatan peran *teaching factory* sebagai model pembelajaran industri di sekolah dan pengembangan jiwa kewirausahaan para siswa;	Terbentuknya kelompok usaha binaan industri kepada siswa SMK.	15%	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	Disdikpora, Dinas Koperasi dan UMKM	sda
	d. Mengembangkan produk unggulan lokal yang laku jual secara kontinyu;	10 produk *teaching factory* setiap tahun.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora, Dinas Koperasi dan UMKM	sda
	e. Membuka *show room* produk SMK di sektor pariwisata yang potensial.	Penambahan *show room* produk SMK di sektor pariwisata potensial setiap tahun.	10 tempat	20 tempat	30 tempat	50 tempat	70 tempat	80 tempat	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6	Mengembangkan sistem pembelajaran kejuruan yang terintegrasi dengan sistem sertifikasi kompetensi: a. Melakukan analisis dan sinkronisasi kompetensi pada mata pelajaran di SMK dengan Skema sertifikasi kompetens; b. Mengembangkan pembelajaran peminatan kejuruan sesuai Materi Uji Kompetensi (MUK); c. Melaksanakan Uji Profesi sesuai pencapaian kompetensi setiap tingkat (kelas X, XI, XII).	Lulusan SMK terintegrasi dengan LSP.	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Disdikpora	sda
7	Pengembangan manajemen SMK berbasis industri.	Penguatan manajemen 75 SMK setiap tahun.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

8	Evaluasi model pembelajaran di kelas.	Dokumen hasil evaluasi setiap 1 kali setiap tahun.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	sda
STRATEGI IV	Penyediaan sistem penjaminan mutu.									
No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Fasilitasi tes kebugaran dan tes kesehatan siswa SMK.	10 SMK setiap tahun.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	KADIN DIY, Disnakertrans, PT
2	Fasilitasi siswa pendidikan menengah kejuruan yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa sertifikasi kompetensi.	125 siswa setiap tahun.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	sda
3	Pemenuhan asesor, TUK dan LSP-P1 untuk penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi siswa.	25 SMK setiap tahun.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4	Sosialisasi pembentukan jiwa kewirausahaan dan kebekerjaan.	206 SMK setiap tahun.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	sda
5	Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi siswa penyandang disabilitas.	1 SMK setiap tahun.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora	sda

E. KEBIJAKAN: KEMITRAAN.

SASARAN: 100% SMK melakukan upaya optimalisasi peran kemitraan yang integratif untuk mendukung peningkatan keterserapan lulusan SMK (penyumbang 0% pengangguran).

STRATEGI I	Penguatan peran DUDIKA, PT dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK yang berorientasi ke permintaan (*demand-driven TVET*).

No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Penyediaan data kebutuhan pasar tenaga kerja (jenis okupasi, kompetensi dan jumlah tenaga kerja dll) terkini dan proyeksi ke depan.	Tersedianya data kebutuhan pasar tenaga kerja; FGD 1 kali setiap tahun.	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Disdikpora	KADIN DIY, Disnakertrans, HIPMI, PT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2	Pendataan, sinkronisasi dan kerjasama SMK dan DUDIKA.	Sinkronisasi data.	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Disdikpora, Disnakertrans	KADIN DIY, PT
	a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri lokal, nasional dan internasional.	FGD 1 kali setiap tahun.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora, Disnakertrans	sda
	b. Meningkatkan jumlah aspek kerja sama (sinkronisasi kurikulum, pembelajaran, peralatan, pendidikan dan pelatihan, serta penempatan kerja lulusan).	Optimalisasi peran kerjasama SMK-DUDIKA di semua aspek.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	c. Fasilitasi kolaborasi dari DUDIKA di SMK sebagai penyusun kurikulum.	SMK berkolaborasi dengan DUDIKA dalam menyusun kurikulum berbasis DUDIKA.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
	d. Fasilitasi kolaborasi dari DUDIKA di SMK sebagai guru/ praktisi mengajar	SMK menggunakan praktisi DUDIKA sebagai Guru.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
3	Penguatan peran dan *link* DUDIKA dalam meningkatkan kemampuan kerja lulusan SMK.	Meningkatnya kolaborasi DUDIKA dan SMK dalam ekosistem vokasional	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Disdikpora	PT, Disnakertrans, KADIN DIY
	a. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi mentor pemagangan dari industri;	2 kali pelatihan (peserta 20 orang) setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	b. Pembuatan laporan *best practice* penyelenggaraan PKL;	5 perusahaan setiap tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
	c. Pengembangan kesepakatan PKL antara SMK dengan DUDIKA.	10 MoU setiap tahun; 20 instruktur industri setiap tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
4	Peningkatan keterserapan lulusan SMK di DUDIKA.	Lulusan SMK terserap 100% di DUDIKA.	75%	75%	75%	75%	80%	80%	Disdikpora	sda
5	Peningkatan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri:	Peningkatan jumlah TKI.	30%	40%	50%	60%	70%	75%	Disdikpora, Disnakertrans	sda
	a. Menyelenggarakan forum komunikasi penempatan tenaga kerja antara PPKS/BKK dan perusahaan di wilayah DIY dan luar DIY;	Terselenggaranya Forum komunikasi PKKS/BKK 3 kali setiap tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	b. Optimalisasi penempatan tenaga kerja melalui MoU antara PPKS/BKK/ SMK/LPK/perguruan tinggi dan DUDIKA.	50 MoU setiap tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
	c. Optimalisasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri;	100 orang setiap tahun.	50%	60%	75%	85%	95%	100%	Disnakertrans	sda
	d. Penguatan kapasitas petugas pengantar kerja dan petugas antar kerja (di PPKS/BKK);	50 orang setiap tahun	50%	60%	75%	85%	95%	100%	Disdikpora	sda
	e. Mendorong pembentukan Bursa Kerja Khusus di SMK;	207 SMK.	50%	60%	75%	85%	95%	100%	Disdikpora	sda
	f. Optimalisasi Forum HRD dalam penyebarluasan kesempatan kerja;	50 perusahaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disnakertrans	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	g. Peningkatan jumlah kemitraan dengan DUDIKA melalui Forum BKK SMK.	100 perusahaan setiap tahun.	20%	40%	60%	80%	90%	100%	Disdikpora, Disnakertrans	sda
6	Koordinasi antar berbagai pihak terkait untuk mendukung pendidikan SMK yang efektif, efisien, dan fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan	FGD 1 kali setiap tahun; Dokumen koordinasi/ partisipasi antar berbagai pihak.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
STRATEGI II	Peningkatan peran perguruan tinggi dalam pengembangan SMK.									
No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Pengembangan konsep dan dokumen terkait penerapan PKJ.	Indikator penilaian PKJ; Template modul ajar dan instrumen penilaian PKJ.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora, Dewan Pendidikan	PT, Disnakertrans

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2	Pengembangan konsep *e-learning* di semua SMK.	Instrumen analisis kebutuhan dan evaluasi, konsep spesifikasi konten *e-learning.*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora, BTKP	PT, Diskominfo
3	Pengembangan pembelajaran *billingual* di SMK berpotensi.	Modul ajar dan indikator penilaian pembelajaran *billingual.*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora, Balai Dikmen	PT, Balai Bahasa
4	Pendampingan pada guru SMK dalam penulisan publikasi artikel ilmiah baik hasil penelitian maupun *best practice*	Publikasi artikel ilmiah guru SMK.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora, BTKP	PT, BPMP
5	Pengembangan media pembelajaran dan pembaharuan strategi pengajaran di SMK.	Instrumen analisis kebutuhan dan evaluasi, *judgement expert,* pelatihan 2 kali setiap tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora, BTKP	PT, BPMP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

STRATEGI III	Penguatan peran LSP dalam hal sertifikasi.									
No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Peningkatan jumlah TUK LSP-P1 SMK: a. Menyelenggarakan pelatihan asesor (asesor lisensi, asesor kompetensi, *lead asesor*, dan fasilitator sistem menajemen mutu dan menyusun dokumen LSP-P1 SMK); b. Membangun Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memadahi untuk setiap kompetensi keahlian keahlian di setiap sekolah;	Meningkatnya jumlah SMK dengan LSP-P1 (5 LSP setiap tahun); Pelatihan asesor 2 kali setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	Disnakertrans, LSP Daerah, PT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	c. Membentuk lembaga sertifikasi Pihak I untuk setiap program keahlian sesuai Skema SKKNI;									
2	Penguatan dan kerjasama dengan LSP di daerah dalam pelaksanaan uji kompetensi	Koordinasi rutin (minimal 2 kali setiap tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
3	Menjalin Kerja sama dengan LSP-P2, LSP-P3 atau LSP bertaraf internasional untuk melaksanakan uji kompetensi bagi lulusan SMK.	lulusan SMK memiliki sertifikasi dari LSP-P2, LSP-P3	10%	20%	30%	40%	45%	50%	Disdikpora	sda
		Lulusan SMK memiliki sertifikasi internasional	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Disdikpora	sda
4	Membentuk lembaga sertifikasi kompetensi bagi guru teknik dan pusat pengembangan kewirausahaan siswa SMK, sebagai bentuk revitalisasi BLPT.	Meningkatnya jumlah lembaga sertifikasi kompetensi.	10%	20%	30%	40%	45%	50%	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

F. KEBIJAKAN: PENGELOLAAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN.										
SASARAN: 100% SMK melakukan upaya pengelolaan dan penataan lembaga secara mandiri dan berdaya saing.										
STRATEGI I	Pengelolaan SMK yang baik dengan menerapkan keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, efisiensi dan efektivitas, serta penguatan skema pendanaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sehingga menjadi SMK terkemuka di Asia Tenggara.									
No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Penyusunan kembali tata organisasi tentang kewenangan, tanggungjawab dan tugas balai dikmen berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SMK.	Tersusun dokumen tata organisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) beserta SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora, Balai Dikmen	PT, Disnakertrans, KADIN DIY, LSP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2	Optimalisasi pembiayaan pendidikan (tata kelola keuangan SMK yang fleksibel).	Tersusunnya RKAS dan RBA.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora, Balai Dikmen	PT, Disnakertrans, KADIN DIY, LSP
3	Terwujudnya kemitraan pendanaan / dukungan (CSR) dari perguruan tinggi, dan Dunia Usaha-Dunia Industri (DUDIKA).	FGD 1 kali setiap tahun, dan terwujud 10 MOU/IA setiap tahun dari pihak terkait pemberi alternatif pendanaan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora, Disnakertrans	Dinas Koperasi & UMKM, PT, KADIN DIY, LSP
4	Pengembangan SMK BLUD.	Semua SMK Negeri menjadi SMK BLUD.	50%	60%	75%	100%	100%	100%	Disdikpora, Balai Pendidikan Menengah	PEMDA, KADIN DIY, Disnakertrans,
5	Kebutuhan Biaya Operasional SMK	SMK mampu mengurangi beban pembiayaan operasional dari orangtua.	2%	2%	2%	3%	5%	7%	Disdikpora, Balai Pendidikan Menengah	PEMDA, KADIN DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

G. KEBIJAKAN: PENDIDIKAN KHAS KEJOGJAAN DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL.										
SASARAN: 100% SMK telah melaksanakan program pembudayaan Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ).										
STRATEGI I	Pembudayaan PKJ.									
No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Pelatihan penyusunan modul ajar yang mengintegrasikan PKJ.	Tersusunnya modul ajar yang mengintegrasikan PKJ di SMK.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	PT
2	Internalisasi karakter kejogjaan untuk semua SMK (implementasi PKJ pada pembelajaran).	Diterapkannya budaya PKJ di SMK.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	PT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3	Fasilitasi peningkatan kompetensi guru untuk memanfaatkan TIK dalam implementasi pembelajaran dengan penguatan PKJ.	Meningkatnya kompetensi guru dalam implementasi pemanfaatan TIK pada penguatan PKJ .	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdikpora, Balai Tekkomdik	PT, BLPT
4	Fasilitasi lomba pembudayaan PKJ berbasis TIK bagi peserta didik	Meningkatnya peserta didik SMK yang terfasilitasi.	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Disdikpora, Balai Tekkomdik	PT, Disnakertrans

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5	Pengembangan program yang memadahi untuk menjaga, mengembangkan nilai karakter kejogjaan serta mengantisipasi terjadinya kenakalan remaja melalui proses pembiasaan.	SMK mengembangkan program PKJ.	50%	75%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora, Dewan Pendidikan	PT, Dinas Kebudayaan
6	Penelaahan dampak internalisasi PKJ bagi lulusan SMK.	Laporan dampak internalisasi lulusan SMK.	50%	75%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	PT
7	Pembaharuan modul ajar hasil evaluasi dampak internasionalisasi PKJ bagi lulusan SMK.	100 SMK melakukan pembaharuan modul ajar PKJ SMK.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	PT
H. KEBIJAKAN: SISTEM INFORMASI (SI) HULU – HILIR PENDIDIKAN KEJURUAN.										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN: Tersedianya sistem informasi yang komprehensif dan integratif dengan pihak terkait dari hulu ke hilir untuk memastikan kematangan karir dan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja.

STRATEGI I	Membangun sistem informasi terintegrasi dari proses promosi SMK, penelusuran karir siswa selama bersekolah di SMK, informasi pasar kerja, penempatan kerja lulusan SMK, tata Kelola kelembagaan yang mendukung mekanisme akuntabilitas, dan mendukung aksesibilitas pengembangan kapasitas PTK dan siswa SMK (SMK, Disdikpora, dan berbagai pihak terkait)

No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Mengevaluasi sistem informasi (SI) terkait informasi lulusan SMK yang dikembangkan sebelumnya.	Diperoleh rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	PT, Disnakertrans, KADIN DIY, LSP, Diskominfo

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2	Pengembangan instrument analisis dan evaluasi SI promosi SMK Se-DIY melibatkan berbagai pihak terkait	Diperoleh instrumen analisis dan evaluasi; FGD 2 kali.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	Sda
3	Analisis kebutuhan pengembangan SI promosi SMK Se-DIY melibatkan berbagai pihak terkait	Diperoleh laporan analisis kebutuhan; FGD 2 kali.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	Sda
4	Pembaharuan data pada SI.	FGD 2 kali setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	Sda
5	Pemeliharaan, evaluasi dan peningkatan (hasil evaluasi) SI tahunan	FGD 2 kali setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	Sda
I. KEBIJAKAN: MONITORING DAN EVALUASI (MONEV).										
SASARAN: Melakukan monitoring proses dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pada 100% program revitalisasi SMK kepada pengguna dan para pihak yang terkait.										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

STRATEGI I	Monitoring proses program revitalisasi SMK dari para pihak terkait serta mengevaluasi pelaksanaan program revitalisasi SMK dan tingkat kepuasan para pengguna program revitalisasi SMK (monev).

No.	PROGRAM/ RENCANA TINDAK	TARGET CAPAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PELAKSANA	
									Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	Menyusun mekanisme rencana kerja, implementasi dan sistem monev dan pelaporan.	Dokumen SOP dan rencana kerja program monev.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	PT, Disnakertrans, KADIN DIY, LSP
2	Menyusun template monev dan pelaporan.	Template monev dan pelaporan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	Sda
3	Mendefinisikan konsep, cakupan monev dari setiap OPD untuk menghindari interpretasi.	Kesepakatan bersama mengenai cakupan monev termasuk indikator dan mekanisme pengukurannya.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4	Melakukan sosialisasi SOP, rencana kerja monev dan peningkatan kapasitas pada pemangku kepentingan.	Pemahaman bersama seluruh *stakeholder* mengenai SOP dan rencana kerja monev revitalisasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
5	Menyusun mekanisme penghimpunan data dari berbagai sumber yang relevan.	Dokumen mekanisme penghimpunan data dan daftar kebutuhan data.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
6	Melaksanakan monev program revitalisasi untuk memastikan pencapaian tujuan revitalisasi.	Dokumen hasil monev yang dapat menjadi *input*/ rekomendasi untuk kemajuan kedepannya.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
7	Menyajikan data tahunan monev secara terpusat.	Tersedianya data hasil/ capaian rencana tindak di delapan kebijakan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

8	Mengevaluasi dampak yang terjadi setelah program dilaksanakan.	Hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil monev.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
9	Menyusun dokumen pelaporan hasil monev.	Tersedianya dokumen pelaporan monev.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda
10	Penyampaian dokumen pelaporan hasil monev.	Tersedianya dokumen pelaporan monev.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora	sda

Daftar singkatan/istilah:

1. Disdikpora : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
2. Disnakertrans : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Diskominfo : Dinas Komunikasi dan Informatika
4. BLPT : Balai Latihan Pendidikan Tekhnik
5. BTKP : Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan
6. BPMP : Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
7. LSP : Lembaga Sertifikasi Profesi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

8. KADIN : Kamar Dagang Industri Nasional
9. HIPMI : Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
10. PT : Perseroan Terbatas
11. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
12. SOP : Standart Operasi Prosedur
13. FGD : Focus Group Discusion

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

Hary Setiawan, S.H., M.H.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara